

BAB III

KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN KEKUASAAN PADA TAHUN 1950-AN

Pada bab II telah diuraikan struktur yang terdapat dalam *SDJ* yang bertujuan untuk mengetahui unsur pembentuk novel tersebut. Unsur-unsur di dalam novel sangat penting karena berguna untuk menganalisis peristiwa atau gejala-gejala sosial yang terdapat di dalam teks dalam kaitannya dengan realitas konteks.

Peristiwa di dalam novel merupakan suatu gambaran kehidupan tokoh-tokoh yang mengandung nilai-nilai sosial tertentu, sehingga sifat fiksionalitas novel merupakan bahan baku untuk memberi makna kehidupan atas novel tersebut. Setiap peristiwa dan perilaku dalam novel dapat dianggap sebagai bentuk-bentuk fakta sosial yang umum terjadi pada kehidupan masyarakat. Sehingga tidak berlebihan apabila sastra dianggap sebagai cermin kehidupan masyarakat.

Sastra yang dianggap sebagai cermin kehidupan masyarakat nyata mempunyai dimensi dan problematika yang hampir sama dengan realitas suatu jaman yang dicitrakannya. Hal ini dikarenakan hubungan antara dunia rekaan pengarang dengan kenyataan merupakan sebuah interaksi dan saling mempengaruhi atau berkaitan dua arah (Teeuw, 1983: 229). Realitas yang digambarkan oleh sebuah karya sastra secara imajinatif seringkali tidak dapat

lepas dari kehidupan atau konteks sosial yang menjadi latar belakang penciptaannya.

Ignas Kleden (dalam Semi, 1989: 59) menyebutkan bahwa sastra adalah karya individual yang didasarkan pada kebebasan mencipta dan dikembangkan lewat imajinasi. Dia pertama-tama karena merupakan cermin diri sang pengarang itu sendiri meliputi persoalan dan motif-motif pribadinya. Bila dia kebetulan mengucapkan suatu keadaan umum masyarakat, maka hanyalah lantaran persoalan umum itu kini terasa sebagai masalah pribadinya sendiri. Karya sastra juga dapat berupa imajinasi yang menggunakan lingkungan kemasyarakatan sebagai titik tolak, dalam arti, sastra boleh jadi berupa interpretasi kehidupan, dan boleh jadi pula suatu ketika akan berupa imitasi kehidupan yang dapat membuat manusia lebih memahami hidup dan problematikanya.

Novel *SDJ* merupakan sebuah karya imajinatif Mochtar Lubis berlatar tahun 1950-an yang memiliki problematika yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Problematika yang dimaksud merupakan bentuk perilaku kelompok-kelompok yang menyimpang dengan tujuan masing-masing. Tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan merugikan masyarakat dapat dikelompokkan sebagai bentuk gejala penyimpangan sosial yang menarik untuk ditelaah guna mencari akar permasalahan yang mendasarinya. Dalam teks *SDJ* banyak menggambarkan penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing dalam cerita.

Sistem demokrasi parlementer pada masa orde lama yang diharapkan dapat memberikan pelajaran politik kepada rakyat justru menjadi bibit-bibit kehancuran bagi bangsa Indonesia. Para elit politik cenderung mengutamakan kepentingan partai atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat yang berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan. Realitas sejarah yang berfokus pada penyimpangan kekuasaan di era orde lama masa pemerintahan kabinet Ali I (1953-1955) dalam *SDJ* akan ditelaah dengan berpijak pada teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Georg Lukacs yang mengutamakan aspek kesejarahan. Unsur-unsur teori Lukacs tersebut antara lain meliputi *kesetiaan sejarah*, yaitu keharusan-keharusan sejarah yang didasarkan pada basis sosial ekonomi yang sesungguhnya; *keaslian sejarah* yaitu kualitas kehidupan batin, heroisme, kemampuan untuk berkorban, keteguhan hati, dan sebagainya yang khas untuk suatu jaman; dan yang ketiga adalah *keaslian warna lokal* yaitu deskripsi yang setia tentang keadaan fisik, tata cara, peralatan dan sebagainya yang membantu memudahkan penghayatan sejarah (Lukacs, 1962: 45).

Langkah ini ditempuh agar diperoleh suatu pemahaman secara korelatif antara realitas konteks dengan dunia imajinatif teks khususnya mengenai tindakan penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

3.1 Keberadaan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Liberal sebagai Perwujudan Warna Lokal Tahun 1950-an

Pada awal pascakemerdekaan Indonesia tahun 1950-an pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai landasan konstitusi sekaligus menerapkan demokrasi parlementer dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi parlementer disebut juga dengan demokrasi liberal yang berbeda dengan sistem presidensial. Dalam sistem parlementer posisi kepala negara dijabat oleh perdana menteri yang diangkat dari partai-partai besar yang mendominasi kehidupan politik bangsa dengan suatu kabinet sebagai pendukungnya, sedangkan kedudukan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Susunan kabinet yang menjadi pendukung pemerintahan diambil dari orang-orang yang berkecimpung dalam partai-partai politik tertentu yang dianggap sebagai pendukung serta mempunyai pemikiran sejalan dengan partai tersebut. Pada sistem parlementer seringkali terjadi pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh partai-partai oposisi dengan tujuan untuk merebut kekuasaan.

Keberadaan partai politik jumlahnya sangat banyak dalam sistem demokrasi liberal. Hal ini merupakan perwujudan reaksi dari pernyataan bung Hatta sebagai wakil presiden yang menyerukan kebebasan demokrasi bagi rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik yang dapat menyalurkan keinginan-keinginan masyarakat kepada perwakilan rakyat yang berbentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Timbulnya partai politik yang sangat banyak menimbulkan permasalahan tersendiri, diantaranya yaitu persaingan untuk menempatkan tokoh-tokoh partai dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan kelompok

masing-masing untuk kemakmuran dan tujuan materialistik. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan di masa perjuangan fisik yang mengutamakan kebersamaan untuk mengusir penjajah.

Perdebatan-perdebatan antartokoh partai sering terjadi. Salah satu diantaranya adalah perdebatan PNI yang berlatar belakang nasionalis dengan Masyumi yang menjadi oposisi berlatar Islam. Pada teks *SDJ* digambarkan bahwa terjadi perdebatan antara Akhmad yang berasal dari PKI dengan Murhalim mengenai dasar negara Pancasila. Hal ini terdapat pada kutipan berikut :

“Ha, Pancasila,” kata Akhmad, “Saya bisa menyusun argumen-argumen yang meyakinkan orang bahwa pancasila itu sebenarnya negara Islam, atau negara Nasrani, atau satu *welfare state sosialis*, atau juga negara komunis.” (Lubis, 1992: 46)

Perdebatan yang dilakukan oleh Akmad dan Murhalim yang berasal dari kelompok yang berlainan tersebut terdapat dalam realitas tahun 1950-an bahwa terjadi pertentangan antara pemimpin Masyumi sebagai partai yang berbasis ideologi Islam telah menyangkal bahwa perjuangan partai untuk negara berdasarkan Islam itu bertentangan dengan Pancasila, lima azas negara yang berlaku. Pemimpin PNI juga tidak kalah kerasnya menegaskan bahwa dukungannya pada Pancasila tidak berarti mencerminkan sikap yang kurang hangat kepada Islam. Walaupun demikian, kedua pihak terus saja saling menuduh (Feith, 1999: 16). Suasana kampanye menjelang pemilihan umum pada masa kabinet Ali I telah berpengaruh secara luas dalam kehidupan kepartaian maupun kehidupan masyarakat umum, sehingga kegiatan partai kian meningkat pada penonjolan ideologi. Kepentingan ideologi lebih mewarnai hubungan-hubungan

dan pertentangan antara partai-partai atau golongan-golongan terutama berkisar pada masalah ideologi. Salah satu contohnya adalah pemberontakan di Aceh yang meletus pada bulan September 1953 merupakan bentuk ketidakpuasan sekelompok rakyat terhadap pemerintah, juga terutama berlatar belakang ideologi (Wilopo, 1978: 36).

Kabinet yang berkuasa dalam pemerintahan seringkali tidak dapat menjalankan program kerjanya dengan baik akibat tindakan oposisi yang cenderung menjatuhkan dengan tujuan merebut kekuasaan tersebut. Isu-isu kemiskinan dan dinamika politik merupakan bahan menarik untuk perdebatan, karena tiap-tiap partai selalu mengajukan tuntutan sebagai syarat untuk ikut serta dalam kabinet. Isu-isu kerakyatan digunakan sebagai bahan perdebatan untuk memuluskan langkah partai dalam rangka memperoleh kekuasaan. Hal ini terdapat dalam kutipan teks *SDJ* berikut ini :

“Partai adalah buat kaum buruh, petani dan seluruh rakyat. Akan tetapi partai hanya bisa memberikan apa-apa bagi rakyat, jika partai kita berkuasa. Untuk berkuasa, partai kita harus jadi besar dan kuat. Sebab itu fase kini adalah fase pembangunan partai. Dan bukanlah dapat diharapkan kita semua ikut menyumbang pada pembangunan partai, terhitung juga kaum buruh?” (Lubis, 1992: 119)

Pembentukan kabinet juga sering menemui kendala karena untuk memperoleh dukungan dari parlemen, juga harus mampu untuk memperhitungkan partai-partai kecil, sebab formatir tidak akan bisa hanya menyandarkan diri pada kekuatan partai-partai yang dianggap besar waktu itu. Oleh karena jumlah partai kecil cukup banyak, maka dukungan mereka merupakan faktor yang menentukan (Wilopo, 1978: 22).

Pemerintahan kabinet parlementer dapat dikatakan identik dengan pemerintahan partai. Partai-partai pada waktu itu telah lebih nyata menjalankan peranan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Wilopo, 1978: 25-27). Hal ini dikarenakan pola kebijakan pemerintah bergantung kepada keinginan partai serta dikendalikan sepenuhnya oleh tokoh-tokoh partai. Apabila kebijakan tersebut dianggap menguntungkan partai, maka akan dilanjutkan dan didukung sepenuhnya oleh komponen kepartaian yang terlibat. Keadaan ini juga diinterpretasikan dalam novel *SDJ* pada kutipan berikut :

“Telah berkali-kali dijelaskan oleh partai, bahwa pemerintah yang berkuasa kini lebih progresif dari pemerintah-pemerintah yang pernah ada di Indonesia. Meskipun di samping ini kita tidak membutuhkan mata kita pada segi-segi kebijaksanaan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. Akan tetapi untuk perkembangan partai kita, maka kabinet ini perlu kita sokong terus.” (Lubis, 1992: 115).

Di sisi lain, partai oposisi telah siap untuk menjatuhkan keberadaan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan rakyat maupun kelompok oposisi tersebut dengan mengangkat tema-tema yang bersifat kerakyatan juga.

Permasalahan yang berkembang dalam pemerintahan kabinet adalah banyaknya tekanan yang berasal dari kelompok oposisi dengan cara menggerakkan rakyat sebagai sarana politik untuk mencapai tujuannya. Adanya paham-paham dan kehendak yang berbeda-beda antara partai-partai politik dan kelompok dalam tubuh parlemen juga direaksi oleh masyarakat luas yang mengikuti berita dari surat kabar (Wilopo, 1978: 27). Di sinilah peranan pers sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan. Pers dijadikan sebagai alat

propaganda untuk mengukuhkan kekuasaan dan sebaliknya bagi partai oposisi digunakan untuk menyerang kebijakan pemerintah.

Realitas yang terjadi dalam sistem demokrasi parlementer terdapat pada keadaan yang digambarkan dalam novel *SDJ*. Kebijakan pemerintah sepenuhnya banyak menguntungkan partai pendukungnya dikarenakan orang-orang yang memegang kekuasaan tersebut tidak terlepas dari dukungan partai untuk memperoleh jabatannya. Hal ini terdapat pada kutipan berikut :

“Anggota-anggota kita yang memegang kekuasaan telah mendapat instruksi untuk membantu usaha partai ini” (Lubis, 1992: 65).

“Ah perkara risiko saudara jangan takut. Menteri-menteri kita akan melindungi” (Lubis, 1992: 67)

Pada kedua kutipan tersebut jelas menunjukkan bahwa pemerintahan yang berkuasa lebih mementingkan tujuan kelompoknya masing-masing. Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat negara dijadikan payung hukum bagi partai dalam segala tindakannya. Kebijakan ini dapat menjadikan suatu efek yang sangat buruk bagi rakyat karena pemerintah tidak lagi sejalan dengan keinginan rakyat melainkan hanya untuk kepentingan partai. Kemiskinan dan keamanan yang rawan menjadi sebuah isu yang diangkat sebagai oposisi untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Pemerintahan partai-partai dalam demokrasi liberal mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terlihat pada proses pembentukan kabinet, partai-partai tenggelam dalam politik “dagang sapi” yang berlarut-larut sehingga acap kali mengagalkan tugas formatir. Kedudukan kabinet yang telah terbentuk tidak dapat bertahan lama jika tidak ditentukan oleh partai-

partai besar seperti PNI dan Masyumi serta partai-partai kecil yang tidak kalah gigihnya menggoyang pemerintahan yang sah. Itulah sebabnya formatir juga harus memperhatikan kedudukan partai-partai kecil (Wilopo, 1978: 36).

3.2 Tindakan Korupsi oleh Pemerintah pada Masa Kabinet Ali I dalam Teks *SDJ*

Pada bab II telah dijelaskan bahwa latar waktu dalam novel *SDJ* adalah masa pemerintahan kabinet Ali. Pada masa itu dijelaskan dalam teks bahwa Husin Limbara merupakan tokoh pemimpin partai Indonesia yang berencana untuk memenangkan pemilihan umum agar kekuasaan tetap dipegang oleh orang-orangnya dalam pemerintahan. Upaya untuk memenangkan pemilihan umum dilakukan dengan cara melakukan kampanye sebagai sarana sosialisasi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap anggota maupun kader partai untuk ikut memikirkannya. Kedudukan Husin Limbara sebagai ketua partai berusaha meyakinkan kader-kadernya agar memenangkan partai demi tujuan-tujuan mulia yaitu mempertahankan ideologi negara dari ancaman partai lain yang berbeda asas ideologi. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut :

“...semua ini kita bikin untuk keselamatan perjuangan bangsa kita menciptakan keadilan sosial, untuk membela Pancasila sebagai dasar negara kita. Partai kita satu-satunya partai politik yang dengan tegas hendak membela Pancasila sebagai dasar negara. Partai-partai Islam mau membikin negara Darul Islam, partai komunis mau bikin negara komunis, dan demikian seterusnya. Karena itu partai kita harus menang dalam pemilihan umum. untuk

menang, partai kita harus mempunyai fonds yang cukup besar dan kuat.” (Lubis, 1992:137)

Husin Limbara sebagai ketua partai berusaha menyusun rencana untuk memenangkan pemilu yang membutuhkan dana sangat besar. Pembicaraan yang dilakukan Husin Limbara dengan Raden Kaslan mewujudkan gagasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan partai. Raden Kaslan mengusulkan untuk membentuk perusahaan-perusahaan fiktif sebagai upaya memperoleh dana kampanye dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya banyak. Perusahaan fiktif (N.V) yang didirikan oleh tokoh-tokoh partai digunakan untuk memperoleh lisensi impor dari Kementrian Perekonomian. Lisensi impor tersebut dikeluarkan dengan cara kolusi dengan pegawai yang merupakan orang-orang partai Indonesia sendiri. Perusahaan fiktif yang telah terbentuk telah diatasnamakan kerabat dan kolega tokoh-tokoh partai antara lain Suryono (anak Raden Kaslan) dan Fatma, istrinya sehingga kerahasiaannya tetap terjaga dan keuntungannya tetap bermuara pada satu tempat. Hal ini terdapat pada kutipan berikut :

“Nah maksudku,” kata Raden Kaslan setelah habis bercerita, “membuat beberapa macam N.V. dengan Fatma jadi direktur, N.V. satu lagi Suryono jadi direktur, dan demikian seterusnya dengan N.V.-N.V. lain, semua kita harus ikut sebahagian, hingga pembahagian keuntungannya dapat kita terima sebanyak-banyaknya. (Lubis, 1992: 69)

Lisensi impor yang diusulkan oleh Raden Kaslan untuk diberikan kepada perusahaan fiktif yang dibentuknya ternyata tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi partai, tetapi juga dirinya. Ia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kerugian yang harus ditanggung oleh negara dan

rakyat kecil yang berjuang dalam kemiskinan akibat inflasi yang dialami oleh negara.

Kenyataan yang diungkapkan dalam teks *SDJ* tersebut merupakan sebuah interpretasi peristiwa dalam sejarah pemerintahan kabinet Ali I. Pemerintah banyak menempatkan orang-orang kepercayaan partai pada kementerian-kementerian yang mempunyai fungsi politik yang penting atau sumber-sumber finansial pada bank-bank pemerintah (Wilopo, 1978: 38). Hal ini jelas bertujuan untuk mengatur dan memuluskan tujuan-tujuan partai agar memperoleh keuntungan dari kekuasaan yang sedang dijabatnya.

Tindakan rekayasa tokoh-tokoh partai yang dekat dengan kekuasaan tersebut menyulut timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai akibat dari perlindungan pemerintah terhadap kepentingan tokoh-tokoh partainya. Dalam teks *SDJ* digambarkan tokoh Sugeng yang menjadi bagian tindakan korupsi. Motif yang dilakukan Sugeng untuk melakukan korupsi berbeda dengan tokoh-tokoh Partai Indonesia yang lainnya, yaitu untuk terbebas dari belenggu kemiskinan dan tuntutan istrinya terhadap sebuah rumah baru untuk menyambut kelahiran bayinya. Tujuan korupsi yang dilakukan oleh Sugeng tersebut, terdapat dalam kutipan berikut :

“Demi Allah,” sumpahnya dalam hatinya, “aku tahu aku selama ini melawan sekeras-kerasnya godaan untuk menjadi jahat. Akan tetapi jika Hasnah mau rumah, dan dapat rumah hanya dengan jalan korupsi.” (Lubis, 1992: 71)

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada tahun 1950-an merupakan salah satu faktor untuk melakukan korupsi terutama di

sektor pegawai negeri yang memiliki peluang sangat besar untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk cepat meraih hasil tanpa harus menunggu lebih lama atau bekerja lebih keras lagi. Masalah korupsi tidak hanya terkait dengan kemiskinan yang dialami oleh seseorang tetapi juga mental yang kurang terpuji sehingga menganggap korupsi merupakan sesuatu hal yang wajar dan umum untuk dilakukan.

Korupsi yang dilakukan oleh Sugeng pada mulanya adalah penjualan lisensi dagang kepada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan tanpa diketahui oleh kantor kementerian perekonomian. Namun akhirnya ketagihan dan tidak dapat mengendalikan diri, bahkan mencari perlindungan kepada partai agar lolos dari jerat hukum. Akibat bergabung dengan partai Indonesia, maka tidak hanya korupsi yang dilakukannya tetapi juga kolusi dengan orang-orang partai menyangkut tugasnya mengeluarkan lisensi istimewa. Kerjasama Sugeng dengan Partai Indonesia dapat dikatakan saling menguntungkan karena ia mendapat perlindungan dari partai dan di sisi lainnya partai mendapatkan keuntungan untuk memeralat Sugeng mengeluarkan lisensi istimewa.

Menurut sumber sejarah disebutkan bahwa mengenai sumber keuangan partai-partai, adalah kenyataan bahwa korupsi di tingkat kementerian untuk mengumpulkan dana kampanye partai dipraktikkan secara besar-besaran pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Dalam hal ini PNI yang paling banyak mendapat keuntungan, karena partai ini memegang *portofolio* keuangan dan ekonomi serta jabatan Perdana Menteri dalam kabinet Ali (Feith, 1999: 38)

Masalah pemberian lisensi istimewa yang diungkapkan dalam *SDJ* sebagai bentuk penyimpangan tindakan pemerintah juga terdapat dalam konteks sejarah tahun 1954 pada masa pemerintahan kabinet Ali I. Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, lebih-lebih yang mengenai “lisensi istimewa” menimbulkan perdebatan sengit di parlemen dan akhirnya oleh Tjickwan dari Masyumi diajukan mosi tidak percaya terhadap menteri perekonomian Iskaq (Wilopo, 1978: 39). Kebijakan politik Mr Iskaq Tjokroadisoerjo terutama mengenai ‘lisensi khusus’ untuk impor diserang hebat oleh Masyumi dan PSI sebagai pemborosan dan bersifat diskriminatif (Feith, 1999: 17).

Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan sorotan tajam dari parlemen yang berdiri pada barisan kelompok oposisi. Akan tetapi mosi yang dilakukan oleh oposisi melalui Tjickwan dari Masyumi dapat dikalahkan oleh anggota parlemen yang lain sehingga kedudukan kabinet tetap kukuh karena dukungan dari orang-orang yang telah diaturnya dalam parlemen. Pendek kata banyak terjadi akal-akalan yang dilakukan oleh partai-partai dalam usahanya untuk memenangkan pemilu. Akan tetapi satu hal yang harus dicatat, yaitu akal-akalan dan penyelewengan tersebut mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Partai-partai masih merasa malu-malu dan menahan diri jika menjalankan praktek-praktek dan akal-akalan itu, karena diawasi dan dikritik oleh partai-partai oposisi atau partai-partai lawannya (Wilopo, 1978: 38-39).

Untuk menangkal dan melindungi tindakan korupsi tersebut, dalam *SDJ* disebutkan bahwa partai melakukan propaganda melalui pers untuk memberitakan fakta yang menguntungkan pemerintah. Propaganda dilakukan dengan menyewa

wartawan Halim sebagai pimpinan harian *Suluh Merdeka*. Harapan penguasa pada waktu itu adalah wartawan Halim dapat memberitakan keadaan yang baik-baik dan menyejukkan bagi rakyat seolah tidak pernah terjadi kecurangan dalam pemerintahan seperti yang diberitakan oleh kelompok oposisi bahwa telah terjadi korupsi yang dilakukan pemerintah. Saling serang pun terjadi antara media yang berpihak kepada pemerintah melawan media oposisi. Keadaan ini terdapat dalam kutipan berikut :

“Hm, kata Halim, saya sudah banyak pengalaman bekerja dengan koran, dan bagaimana mempengaruhi pendapat umum. Jika kita biarkan itu koran-koran oposisi membuka rahasia-rahasia demikian, maka nama kita akan jatuh sekali. Api harus dipadamkan dengan api, sebab itu kita harus kembali menyerang” (Lubis, 1992: 82)

Permasalahan dalam *SDJ* tersebut terdapat dalam konteks sejarah yang sebenarnya terjadi dalam pemerintahan Indonesia. Partai-partai politik mempunyai media massa yang berfungsi sebagai alat propaganda sekaligus perlindungan dari setiap kebijakannya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa perkembangan media massa tidak dapat terlepas dari arah kebijakan pemerintah yang berkuasa. Pers tidak dapat bersikap objektif dalam menentukan sikap bahkan cenderung menjadi alat kekuasaan. Peranan pers sebagai kontrol sosial tidak berfungsi. Hal ini disebabkan keberadaan pers tumbuh karena adanya uluran tangan dari pemerintah. Seperti diketahui bahwa pada masa itu banyak terjadi kemiskinan dan kekurangan, padahal apabila ingin mendirikan sebuah perusahaan media harus mempunyai sumber pendanaan yang sangat kuat agar tetap eksis. Oleh karena itu, orang-orang pers harus pandai-pandai mendekati pemerintah agar memperoleh pendanaan seperti yang dilakukan oleh wartawan Halim dalam teks

SDJ. Ia tidak mepedulikan idealisme, yang terpenting baginya adalah keuntungan walaupun ia harus terlibat korupsi karena penyelewengan dana pemilihan umum.

Kehadiran wartawan Halim dalam teks *SDJ* yang diharapkan dapat memperkuat kedudukan partai di mata masyarakat ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan Halim juga turut menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh partai Indonesia dan mengancam tidak akan mendukung penguasa apabila tidak diberi kedudukan di parlemen. Sifat dasar yang tamak terhadap harta membuat Halim menjual kebohongan terhadap rakyat yang sangat mengharapkan keadilan dari pemerintah.

Peranan media massa yang tergambar dalam teks *SDJ* merupakan suatu pernyataan sebenarnya pada tahun 1950-an. Pada masa itu disebutkan bahwa banyak media massa yang berafiliasi pada partai politik tertentu diantaranya yaitu *Bintang Timur* dan *Harian Rakyat* milik PKI, *Suluh Indonesia* merupakan produk dari Partai Nasional Indonesia. (Depdikbud, 1993: 310). Hal ini bertujuan untuk membantu sosialisasi tujuan-tujuan partai sekaligus menarik simpati rakyat terhadap keberadaan suatu partai politik.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai dalam pemerintahan semakin menambah beban inflasi perekonomian makro. Hal ini ditandai dengan semakin merosotnya kemampuan daya beli masyarakat serta terhambatnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat. Antrian orang-orang untuk memperoleh kebutuhan pokok kerap terlihat di jalan-jalan kota

Jakarta yang merupakan barometer perekonomian sekaligus sentral pemerintahan.

Keadaan tersebut digambarkan dalam *SDJ* sebagai berikut :

“Telah seminggu di Jakarta setiap hari rakyat semakin lama semakin ramai antri membeli beras, minyak tanah dan garam. Pada hari-hari pertama barisan antri tidak begitu panjang. Lima belas atau dua puluh pembeli sekaligus mendatangi warung-warung, dan kemudian habis, ..mereka melihat barisan antri yang panjang-panjang sekali di depan warung-warung di sepanjang jalan dalam kota.” (Lubis, 1992: 271)

Gambaran kesengsaraan masyarakat yang tercermin dalam *SDJ* merupakan interpretasi dari keadaan sebenarnya tahun 1950-an. Rakyat menjadi korban perebutan kekuasaan yang terjadi dalam struktur elit politik pemerintahan. Harga-harga kebutuhan pokok termasuk beras dan garam menjadi mahal sehingga rakyat sulit untuk memperolehnya (Feith, 1999: 17).

Pada akhirnya pengarang *SDJ* memberikan solusi berupa penyadaran tentang bahaya korupsi yang direfleksikan melalui tokoh Idris. Tokoh tersebut ditampilkan untuk menyampaikan pesan bahwa tindakan korupsi harus segera diakhiri untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Bagaimanapun juga korupsi merupakan suatu penyakit atau lebih tepatnya “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan cita-cita masyarakat Indonesia. Keteguhan hati yang ditunjukkan Idris digambarkan oleh dialog yang diungkapkan oleh Dahlia, istrinya yang terdapat pada kutipan berikut :

“Hal itu berapa kali saya katakan kepada suami saya. Akan tetapi dia bilang pada saya, kalau semua pegawai negeri korupsi, maka mau ke mana negeri kita? Bisa hancur!.” (Lubis, 1992: 74)



Kesadaran-kesadaran yang dilakukan oleh sebagian kecil dari individu yang masih memiliki rasa nasionalisme tinggi tidak banyak membantu upaya meredam korupsi. Oleh karena korupsi merupakan suatu mata rantai yang sistematis dan saling terkait satu sama lain. Korupsi telah menjadi suatu bagian tindakan yang membudaya bagi masyarakat Indonesia di tahun 1950-an. Semangat perjuangan yang dulu berkobar berubah menjadi semangat materialistik. Segala sesuatunya diukur dengan uang bahkan untuk menentukan derajat seseorang sekalipun. Kekayaan dipandang sebagai barometer untuk menempatkan seseorang dalam kelompok masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini membuat korupsi semakin merajalela tanpa bisa dibendung.

Dari keadaan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia pada kurun waktu tahun 1950-an berdasarkan pada dua motif tujuan. Motif pertama adalah tujuan kolektif untuk mendapatkan suatu keinginan yang bersifat material dari sekelompok orang yang tergabung dalam sistem kepartaian. Pada kenyataan seperti ini korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terstruktur karena adanya kepentingan dan keterkaitan yang saling bergantung satu sama lain, sehingga sangat sulit dibuktikan keberadaan maupun bukti-bukti untuk diajukan ke pengadilan akibat campur tangan penguasa. Adanya perlindungan dan anggapan bahwa korupsi merupakan tindakan yang wajar dilakukan semakin membuka lebar ruang gerak tokoh-tokoh yang terlibat.

Motif yang kedua adalah tujuan subjektif untuk melepaskan diri dari kemiskinan yang sedang melanda sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu.

Banyak orang berusaha untuk memperoleh kekayaan dengan jalan pintas akibat sulitnya mencari penghidupan pada masa transisi itu. Hal ini disebabkan oleh dorongan ekonomis serta tingginya nasionalisme yang telah memudar sejak perjuangan fisik yang menjadi tujuan kolektif segenap masyarakat Indonesia telah berakhir. Kedua motif tersebut memiliki persamaan yaitu tujuan-tujuan untuk mencapai kemakmuran secara singkat tanpa memperhitungkan efek kerugian yang akan di derita bangsa ini.

Kedudukan pemerintah yang erat kaitannya dengan partai politik merupakan faktor pembuka jalan untuk memperlebar tindakan korupsi. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan partai yang "dititipkan" kepada orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Di sisi lain kebijakan untuk memberi perlindungan bagi kelompok-kelompok partai tertentu merupakan bentuk balas budi terhadap partai yang telah memberikan dukungan dan mengangkatnya menuju kemakmuran.

3.3 Persesuaian Unsur-Unsur Kesejarahan dalam Teks *SDJ*

Dari uraian-uraian sebelumnya mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam *SDJ* terdapat unsur-unsur sejarah sesuai dengan teori yang dikemukakan Georg Lukacs tentang aspek kesejarahan dalam suatu karya sastra. Aspek kesejarahan dalam karya sastra tersebut meliputi kesetiaan sejarah, keaslian sejarah dan warna lokal. Hal ini berfungsi untuk membuktikan bahwa novel *SDJ* adalah novel sejarah sesuai dengan salah satu tujuan penelitian yang akan diuraikan seperti berikut :

3.3.1 Kesetiaan Sejarah

Kesetiaan sejarah merupakan keharusan-keharusan sejarah yang didasarkan pada basis sosial ekonomi yang sesungguhnya (Lukacs, 1962:45). Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa pokok-pokok yang tercakup dalam pengertian kesetiaan sejarah adalah bentuk kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1950-an baik dalam teks maupun realitas konteks yang bersifat korelatif. Kemiskinan yang dialami masyarakat ditandai dengan gejala kelaparan dan penghasilan *minim* sehingga rakyat tidak memperoleh kemakmuran.

Tokoh yang ditampilkan dalam fenomena sosial berupa kemiskinan tersebut adalah Saimun dan Itam yang bekerja sebagai kuli pengangkut sampah. Penghasilannya sebagai buruh kasar hanya sedikit, bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya termasuk untuk makan sekalipun masih sangat kekurangan. Keadaan tersebut merupakan korelasi dari gambaran umum masyarakat Indonesia tahun 1950-an yang mengalami penderitaan dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah masih berada pada tahap memulai pembangunan setelah mengalami peperangan yang sangat panjang. Pemulihan ekonomi berjalan lambat karena keadaan tidak mendukung akibat adanya perebutan kekuasaan dalam sistem parlementer antara tahun 1950-1957 dan kekacauan yang terjadi di daerah-daerah berupa pemberontakan kelompok separatis bersenjata. Ekonomi makro Indonesia berada dalam kondisi terpuruk akibat beban inflasi yang terus meningkat yang dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (Ricklefs, 1991: 359).

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dapat menimbulkan berbagai macam pemikiran baik positif atau negatif. Jika seseorang dapat berpikir positif, maka akan bersabar dan berusaha untuk lepas dari belenggu kesengsaraan dengan cara yang benar, tetapi apabila seseorang berpikiran negatif, maka segala cara akan ditempuhnya seperti tindakan korupsi yang dilakukan tokoh Sugeng dalam teks *SDJ*. Sugeng tidak sabar dengan keadaan yang diterimanya sebagai pegawai negeri yang jujur. Ia merasa perlu berbuat korupsi demi memenuhi keinginan istrinya untuk memperoleh rumah baru yang dirasakannya sangat sulit jika hanya mengandalkan gaji dari kantornya.

Tindakan yang dilakukan oleh Sugeng tersebut merupakan interpretasi dari keadaan yang terjadi pada masa tahun 1950-an. Kemiskinan yang menjadi latar belakang kehidupan masyarakat telah menjadi pemicu korupsi yang semakin membudaya di negeri Indonesia bahkan hingga saat ini. Permasalahan korupsi berkaitan erat dengan pemikiran-pemikiran kapitalisme yang dirasakan oleh tiap-tiap individu dalam mengejar kemakmuran. Segala cara dihalalkan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materialistik tersebut.

Korupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan suatu keadaan yang dilematis. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang dianggap memiliki prestise lebih tinggi daripada seorang maling ayam. Dalam novel *SDJ* disebutkan bahwa tokoh Sugeng, Suryono, dan Raden Kaslan yang giat melakukan manipulasi dan korupsi ternyata memiliki kedudukan yang lebih terhormat daripada seseorang yang bekerja halal seperti Saimun dan Itam. Kenyataan tersebut sangat ironis, karena seharusnya koruptor harus

dihukum dan dikucilkan dari peradaban manusia. Kita dapat mengambil contoh negara Jepang yang menghukum berat seorang terdakwa kasus korupsi, bahkan pejabat yang dijadikan tersangka korupsi seringkali merasa malu dan berusaha untuk bunuh diri.

Realitas yang terjadi di Indonesia merupakan contoh sebuah mental bangsa yang buruk. Pada tahun 1950-an ketika bangsa ini dituntut untuk bersatu dan bangkit membangun bangsa, ternyata di dalam bangsa ini telah tumbuh bibit-bibit kehancuran yang mulai tertanam dan semakin membudaya dalam diri sebagian besar pejabat dan birokrat. Tokoh Sugeng, Raden Kaslan dan Husin Limbara merupakan gambaran buruk dari tatanan pemerintahan negara ini.

Kemiskinan dan korupsi merupakan bentuk kesetiaan sejarah yang bersifat saling mempengaruhi. Hal ini dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi, selain di dukung oleh faktor mental yang rapuh. Keadaan kekurangan seringkali memaksa seseorang untuk tidak dapat menghindari tindakan tidak terpuji yang menjanjikan keuntungan lebih besar.

Korelasi keadaan dalam *SDJ* dengan realitas konteks dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Teks dalam <i>SDJ</i>	Konteks Sejarah
<p>1. Gambaran Kemiskinan</p> <p>Terlihat pada kutipan berikut : “...dan mereka dapat kerja jadi kuli pengangkut sampah. Dan kemudian mereka dapat menyewa pondok pada pondok Pak Ijo, kusir delman. Hanya sebuah kamar saja di sebelah kamar pak Ijo, dan tiga orang anaknya. Akan tetapi lapar yang menggigit-gigit perutnya tidak pernah berhenti, dan kelesuan dalam tulang-tulang tiada pernah bersungguh-sungguh menghilang (Lubis, 1992: 271)</p>	<p>1. Lambannya pemulihan ekonomi menyebabkan inflasi terus berlanjut. Biaya umum meningkat sekitar 100% selama tahun 1950-1957. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu dari kenaikan harga. (Ricklefs, 1991: 359)</p>
<p>2. Perilaku Ingin Cepat Meraih Hasil.</p> <p>Terlihat pada kutipan berikut : “Demi Allah,” sumpahnya dalam hatinya, “aku tahu aku selama ini melawan sekeras-kerasnya godaan untuk menjadi jahat. Akan tetapi jika Hasnah mau rumah, dan dapat rumah hanya dengan jalan korupsi (Lubis, 1992: 71).</p>	<p>2. Percobaan demokrasi parlementer pada tahun 1950-1957 banyak diwarnai dengan korupsi dan kolusi yang menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam masyarakat. Korupsi dan kolusi menyebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah ekonomi yang belum terpecahkan dan banyak juga harapan-harapan yang ditimbulkan revolusi digagalkan (Ricklefs, 1991: 355)</p>

3.3.2 Keaslian Sejarah

Keaslian sejarah adalah kualitas kehidupan batin, heroisme, kemampuan untuk berkorban, keteguhan hati, dan sebagainya yang khas untuk suatu jaman. Pada teks *SDJ* pengarang berusaha menggugah kesadaran rakyat terhadap bahaya korupsi yang sangat sistematis tersebut. Tokoh yang ditampilkan sebagai wujud interpretasi maksud pengarang tersebut adalah Idris yang memegang teguh keyakinan untuk tidak terlibat korupsi. Tindakan Idris menentang korupsi merupakan bentuk penjiwaan nasionalisme yang tinggi pada tahun 1950-an di tengah krisis moral yang melanda sebagian besar kehidupan aparatur negara. Kedudukan Idris sebagai pegawai negeri di Kementerian Pendidikan sebenarnya juga terbuka lebar untuk melakukan korupsi, tetapi ia tidak terpancing untuk turut serta melakukan tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan ia mempunyai keteguhan yang terdapat pada kutipan berikut :

“Itu berapa kali saya katakan pada suami saya. Akan tetapi dia bilang pada saya, kalau semua pegawai negeri korupsi, maka mau ke mana negeri kita? Bisa hancur!” (Lubis, 1992: 74)

Keteguhan hati yang dipegang oleh Idris tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari istrinya yang dikenal materialistik, bahkan ia menjadi bahan olok-olok dalam setiap perbincangan yang dilakukan oleh istrinya. Kejujuran dalam konteks masa tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat mahal untuk ditemukan karena identik dengan keterbatasan dan kemelaratan, terutama di sektor pegawai pemerintahan. Hal ini dikarenakan kondisi rakyat yang semakin terhimpit dengan masalah ekonomi yang tidak kunjung usai.

Karakter yang ditampilkan melalui tokoh Idris merupakan bentuk keteguhan hati yang diharapkan dapat menggugah kesadaran bagi pembaca pada masa tahun 1950-an. Pada masa itu rakyat berlomba-lomba untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan kelaparan yang dialami. Idris merupakan sosok patriotik yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi untuk mempertahankan kebenaran walaupun kebenaran itu sendiri terasa pahit olehnya. Kenyataan tersebut didapatkan melalui cemoohan Dahlia, istri Idris dalam kutipan berikut :

“Bukan seperti suamiku itu, selalu saja berkata bahwa pegawai negeri mesti jujur. Dan biar aku tunjukkan padanya contoh-contoh, bahwa pegawai yang jujur di jaman sekarang pasti hidup melarat, maka dia tetap mau jujur juga. Katanya satu waktu kebenaran akan tiba di negeri kita, dan mereka yang jujur tetap akan selamat.”
(Lubis, 1992: 206)

Keberadaan tokoh Idris berlawanan dengan kualitas kehidupan batin yang banyak terjadi pada masa itu ketika sebagian besar aparatur negara banyak yang melakukan korupsi dan perebutan kekuasaan untuk mengejar nilai-nilai materialistik. Pola-pola kehidupan borjuis yang menjadi warisan penjajah telah mengikis semangat perjuangan bangsa Indonesia yang merasa yakin telah merdeka. Bangsa Indonesia memang telah merdeka, tetapi sampai saat ini tidak demikian, karena kita masih dijajah oleh nafsu dan keserakahan yang dapat meruntuhkan kedaulatan dan perpecahan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya korupsi yang semakin mewabah dalam setiap denyut kehidupan masyarakat Indonesia.

Tokoh-tokoh yang dijadikan perwujudan kualitas kehidupan batin masa tersebut adalah Sugeng sebagai tokoh utama. Kualitas kehidupan batin terbentuk

dari keadaan yang secara umum melingkupi peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Situasi yang kritis dan penuh dengan kekacauan menuntut manusia untuk bertindak individualis serta cenderung mengabaikan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh Sugeng berupa korupsi dan kolusi merupakan pembuktian bahwa keadaan atau situasi secara umum dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang dalam bertindak tanpa menghiraukan kadar kebenaran maupun kesalahannya.

Konteks sejarah pada tahun 1950-an menyebutkan bahwa masalah korupsi dan kolusi yang terjadi khususnya pada sektor pemerintahan telah mencapai tahap mengkhawatirkan dan mendapat sorotan tajam dari rakyat. Rakyat semakin marah terhadap elit politik yang tidak merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Penggambaran elit birokrat dalam novel *SDJ* sesuai dengan keadaan masa tersebut diantaranya adalah menteri perekonomian dalam kabinet Ali I yaitu Mr. Ishaq Tjokrohadisuryo yang mendapatkan sorotan tajam dalam permainan lisensi istimewa di kementerian yang dipimpinnya, bahkan parlemen sempat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap tindakannya. Namun kelompok pimpinan partai yang berkuasa dalam pemerintahan membenarkan perlindungan dan alibi-alibi untuk menyelamatkannya. (Wilopo, 1974: 62).

Heroisme yang tergambar dalam novel *SDJ* ditunjukkan oleh tokoh Hermanto yang berupaya keras untuk melakukan demonstrasi menolak keberadaan pemerintahan yang dianggap tidak lagi memihak kepentingan rakyat. Hermanto bersama dengan Serikat Buruh berupaya menuntut hak-hak rakyat kecil yang tertindas oleh kekuasaan. Tindakan ini adalah suatu bentuk pengorbanan

yang sangat besar karena resiko yang dapat terjadi adalah kematian seperti yang dialami oleh Itam. Kenyataan ini sejalan dengan konteks tahun 1950-an ketika gelombang protes dan unjuk rasa terus begulir menentang kebijaksanaan pemerintah yang dikenal korupsi dan tidak memihak rakyat.

Keaslian sejarah dalam *SDJ* merupakan kejadian yang memiliki korelasi dan dijelaskan dalam tabel berikut :

Teks dalam <i>SDJ</i>	Konteks Sejarah
<p>1. Keteguhan Hati</p> <p>Terdapat pada kutipan berikut :</p> <p>“Hal itu berapa kali saya katakan kepada suami saya. Akan tetapi dia bilang pada saya, kalau semua pegawai negeri korupsi, maka mau ke mana negeri kita? Bisa hancur!” (Lubis, 1992: 74)</p>	<p>1. Korupsi dan kolusi yang telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat membuat rakyat mengadakan tuntutan yang didukung untuk parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa (Wilopo, 1978: 40)</p>
<p>2. Kualitas Kehidupan Batin</p> <p>Kualitas kehidupan batin tercermin pada tokoh Sugeng yang terdapat pada kutipan berikut :</p> <p>“Tentang dirinya sendiri dia tidak merasa berdosa kepada negara. Apa yang dilakukannya hanyalah untuk memenuhi permintaan Hasnah, yang menurut anggapannya sendiri adalah sesuatu yang adil (Lubis, 1992: 122)</p>	<p>2. Anggapan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang legal semakin menyuburkan tindakan ini. Korupsi terjadi di seluruh negara, tetapi fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistemik. Meluasnya praktek korupsi adalah suatu gejala bahwa kontrol</p>

	<p>adalah suatu gejala bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. (Djani, Mei 2004)</p>
--	--

3.3.3 Keaslian Warna Lokal

Keaslian warna lokal adalah deskripsi yang setia tentang keadaan fisik, tata cara, peralatan dan sebagainya yang membantu memudahkan penghayatan sejarah (Lukacs, 1962: 45). Dari uraian sebelumnya dapat diperoleh bentuk-bentuk warna lokal yang khas dari jaman tahun 1950-an yaitu mengenai keberadaan partai-partai politik dan surat kabar yang terbit pada masa itu. Partai-partai politik tumbuh sebagai reaksi atas pernyataan wakil presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kelompok-kelompok politik sebagai sarana menampung aspirasi dari masyarakat. Pernyataan tersebut ditanggapi dengan banyaknya partai politik tahun 1950-an.

Keberadaan partai politik yang cukup banyak pada tahun 1950-an jumlahnya mencapai lebih dari 20 partai (Harris, 1998:214) merupakan fenomena tersendiri dalam kehidupan politik Indonesia karena masing-masing partai tersebut mengusung tujuan dan ideologi yang berlainan dan tidak jarang menimbulkan perdebatan sengit diantaranya. Partai-partai yang muncul dalam kancah perpolitikan Indonesia tersebut kebanyakan mempunyai media massa sebagai propaganda perjuangan politiknya. Hal ini merupakan langkah yang sangat tepat karena masyarakat akan mudah memahami arah pemikiran dan tujuan politik suatu golongan dari media massa yang hadir di tengah-tengah rakyat. Contoh-contoh yang dapat ditemukan adalah PNI dengan harian *Suluh Merdeka*, *Suluh Marhaen* dan *Suluh Indonesia* yang diharapkan dapat mendongkrak popularitas dan kebijakan partai dalam upaya mempertahankan kekuasaan pada masa pemerintahan kabinet Ali I. Di sisi lain, PKI yang konsisten menggunakan

basis massa buruh dan petani sebagai komoditas politiknya juga mempunyai media *Harian Rakyat* dan *Bintang Timur*. Pembicaraan mengenai media massa pada waktu itu merupakan sebuah kajian yang menarik karena sesuai dengan tujuannya, pers merupakan sebuah media kontrol sosial yang diharapkan objektif dalam memberikan penilaian dan proporsional dalam memberikan penilaian terhadap suatu realitas. Namun pada kenyataannya pers justru menjadi alat propaganda bagi pemerintah untuk memberikan keyakinan dan menyalurkan ideologi kepada rakyat.

Barang-barang antik yang ditampilkan sebagai ilustrasi dalam *SDJ* merupakan sebuah perwujudan konteks pada tahun 1950-an. Barang-barang berharga tersebut antara lain berupa gramofon listrik dan kaset-kaset yang bernuansa klasik dan sangat digemari pada jaman tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa merek mobil yang umum dipakai oleh orang-orang kaya pada masa tersebut diantaranya adalah "Cadillac" dan "Dodge". Kendaraan tersebut dianggap sebagai trend yang dijadikan sebagai simbol status sosial. Hal ini diketahui dari tokoh-tokoh yang memiliki barang-barang berharga maupun mobil tersebut adalah tokoh-tokoh yang memiliki status sosial lebih tinggi melalui kekayaan yang dimilikinya.

Teks dalam <i>SDJ</i>	Konteks Sejarah
<p>1. Keberadaan Partai-Partai Politik</p> <p>Hal ini terdapat dalam kutipan berikut :</p> <p>“Raden Kaslan bekerja jadi direktur kantor dagang “Bumi Ayu anggota dewan Partai Indonesia. (Lubis, 1992: 13)</p>	<p>1. Kabinet Ali I merupakan kabinet koalisi yang dibentuk dari Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya dan Masyumi sebagai kekuatan baru menggantikan NU. (Wilopo, 1978: 35)</p>
<p>2. Surat Kabar Yang Terbit Tahun 1950-an</p> <p>Hal ini terdapat pada kutipan berikut :</p> <p>“Raden Kaslan tenang saja. Dia memandang penuh arti pada Halim, pemimpin redaksi surat kabar <i>Suluh Merdeka</i>. (Lubis, 1992: 81)</p>	<p>2. Surat kabar yang beredar di Indonesia pada tahun 1955 antara lain <i>Harian Rakyat, Suluh Indonesia, Suluh Marhaen, Suluh Merdeka</i> dan <i>Bintang Timur</i> (Depdikbud, 1993: 310)</p>
<p>3. Barang-barang berharga di rumah Raden Kaslan.</p> <p>Berikut adalah kutipannya :</p> <p>“Dia memandang ke kemarnya yang penuh dengan barang-barang yang dibawanya dari luar negeri. Sebuah radio, gramofon listrik. Di dalam lemari buku bertumpuk-tumpuk pelat gramofon, komplit pula lagu-lagu klasik dari Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, hingga ke lagu-lagu dansa tango”. (Lubis, 1992: 11)</p>	<p>3. Pada masa pasca kemerdekaan bangsa Indonesia masih banyak terdapat unsur-unsur asing ke dalam kehidupan, ditandai dengan kegemaran bangsawan terhadap musik barat yang diputar melalui gramofon listrik dalam bentuk piringan hitam. (PPI, 1958: 22)</p>

3.4 Relevansi Masalah Korupsi dalam Teks *SDJ* dengan Realitas Indonesia Pasca Reformasi

Keadaan dalam *SDJ* yang didominasi oleh sebuah gejala sosial berupa korupsi dapat dikorelasikan dengan realitas yang terjadi pada konteks pemerintahan pascareformasi. Korupsi merupakan permasalahan sosial sekaligus kejahatan yang tidak terkendali dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan peabotan Indonesia sebagai negara terkorup di Indonesia. Sampai dengan saat ini Indonesia masih berada pada posisi negara terkorup di Asia oleh Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC). Bahkan, Indonesia masih dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina dan Thailand. Demikian hasil survei yang dipublikasi PERC (Kompas, 3 Maret 2004).

Korupsi adalah tindakan yang terjadi hampir di seluruh negara, tetapi fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematis. Hal ini dikarenakan adanya suatu sistem yang saling berkaitan erat mulai dari atas (pemerintah) hingga bawahan. Meluasnya praktek korupsi adalah suatu gejala bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu korupsi yang terkonsentrasi pada tingkat elit kekuasaan (*grand corruption*) dan korupsi yang dilakukan secara 'massal' oleh oknum-oknum pegawai negeri (*petty corruption*). Di Indonesia terutama pada masa rezim orde baru kedua

jenis korupsi telah menjadi kebiasaan dan berkembang secara sistematis dan meluas. Mulai dari hal pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sampai kepada pemberian kredit dan proteksi kepada pengusaha-pengusaha kroni berlaku kebiasaan KKN (Djani dalam www.antikorupsi.org).

Pola demokrasi liberal yang diterapkan pada tahun 1950-an dapat dijadikan sebuah pelajaran pada masa kini. Hal ini dikarenakan kebebasan demokrasi pada waktu itu telah menghasilkan embrio korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat kekuasaan. Pada proses demokratisasi yang berkembang pesat akhir-akhir ini perlu diwaspadai kembali karena terdapat banyak kemiripan dengan masa demokrasi liberal. Sebagai contoh dapat dilihat pada proses pemilihan presiden dimana terjadi suatu tawar-menawar dan koalisi antarpartai untuk memuluskan langkah seseorang menuju kursi presiden. Keberadaan partai-partai politik yang banyak bermunculan

Di sisi lain kedudukan penting dalam pemerintahan identik dengan simbol-simbol kepartaian, sebagai contoh kepala pemerintahan juga sekaligus merangkap ketua partai, ketua DPR juga ketua partai, dan bahkan ketua MPR juga merangkap sebagai ketua partai. Melihat pola kepemimpinan seperti ini kita dapat kembali melihat realitas tahun 1950-an. Pada masa itu banyak kepentingan partai yang didahulukan oleh penguasa daripada kepentingan rakyat termasuk masalah lisensi istimewa yang tidak lain bertujuan untuk kesejahteraan kelompoknya sendiri. Akibatnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme banyak mewarnai sejarah Indonesia dalam sistem liberal. Hal ini disebabkan rakyat tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan kontrol

karena seluruh aparaturnegara telah 'main mata' antara satu sama lain untuk mengejar kepentingannya sendiri-sendiri.

Jika kita melihat pada konteks masa kini ketika Indonesia diposisikan sebagai negara yang terkorup di Asia Tenggara, tentunya dapat dikaitkan dengan kebebasan demokrasi yang berlaku saat ini. Contoh konkret yang dapat ditemukan adalah lemahnya jerat hukum untuk membuktikan korupsi yang dilakukan oleh penguasa yaitu pada kasus penyelewengan dana *non budgeter* bulog yang melibatkan Akbar Tanjung sebagai terdakwa. Pada kasus ini terlihat jelas ada suatu rekayasa politik untuk menyelamatkan penguasa dengan mengorbankan orang-orang terdekat partai yaitu Rahardi Ramelan. Hal ini merupakan kenyataan yang sangat ironis karena ketika rakyat mulai melakukan proses pembelajaran politik justru dikecewakan oleh kebohongan-kebohongan yang telah diatur oleh penguasa. Akumulasi kekecewaan tersebut dapat berdampak luas bagi perkembangan mental masyarakat karena korupsi akan dianggap sebagai suatu budaya yang wajar terjadi dalam masyarakat.

BAB IV
SIMPULAN